



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)
KECAMATAN WONOASIH
TAHUN 2019

KECAMATAN WONOASIH
KOTA PROBOLINGGO

Jl. Jeruk No.1 Telp. (0335) 424902 – Fax (0335) 437700

Email : kecwonoasih.kotaprobolinggo@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019. Penyusunan LKj - IP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2019.

LKj - IP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKj - IP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKj - IP ini.

Probolinggo, Pebruari 2020

CAMAT WONOASIH
KOTA PROBOLINGGO



DEUS NAWANDI,S.STP,M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19781204 199802 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR dan TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Instansi	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Rencana Strategis.....	26
2.2 Program dan Kegiatan	28
2.3 Perjanjian Kinerja.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	33
3.2 Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP.....	48
4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Langkah-langkah untuk meningkatkan Kinerja.....	49

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
Gambar 1. Peta Kecamatan Wonoasih.....	2
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Wonoasih.....	7
Tabel 1.1 Luas dan Jarak Kelurahan ke Kecamatan Wonoasih.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk.....	3
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Agama.....	4
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan.....	4
Tabel 1.5 Data Prasarana Pendidikan.....	5
Tabel 1.6 Jumlah Penduduk menurut Jenis Pendidikan.....	5
Tabel 1.7 Jumlah Tempat Ibadah.....	6
Tabel 1.8 Jumlah Fasilitas Kesehatan.....	6
Tabel 2.1 Program dan Kegiatan.....	28
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja.....	31
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kategori.....	33
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	34
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dan 2019.....	34
Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Periode Renstra	34
Tabel 3.5 Alokasi per-Sasaran Pembangunan	35
Tabel 3.6 Kinerja dan Anggaran.....	35
Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi.....	35
Tabel 3.8 Analisis Kinerja.....	36
Tabel 3.9 Analisis Program/Kegiatan.....	36
Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.....	38
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dan 2019.....	39
Tabel 3.12 Realisasi Kinerja Periode Renstra.....	39
Tabel 3.13 Alokasi per-Sasaran Pembangunan.....	39
Tabel 3.14 Kinerja dan Anggaran.....	40
Tabel 3.15 Tingkat Efisiensi.....	40
Tabel 3.16 Analisis Kinerja.....	40
Tabel 3.17 Analisis Program/Kegiatan.....	41
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran.....	42

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wonoasih Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Wonoasih Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penyusunan LKjIP Kecamatan Wonoasih Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019.

Dalam upaya merealisasikan Rencana Strategis Kecamatan Wonoasih Tahun 2015-2019 menuju tata kelola pemerintahan yang baik, Kecamatan Wonoasih telah melaksanakan program dan kegiatan dengan berlandaskan pada Visi dan Misi Kecamatan Wonoasih. Visi Kecamatan Wonoasih adalah **“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA MENUJU KECAMATAN WONOASIH YANG PARTISIPATIF, AMAN DAN SEJAHTERA BERKELANJUTAN”**

Selaras dengan Visi tersebut, maka Misi Kecamatan Wonoasih adalah :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan;
2. Meningkatkan Kinerja Pembangunan yang berbasis pada masyarakat dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban yang berkualitas;
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi masyarakat dalam rangka optimalisasi PAD;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Sejahtera.

Sesuai Rencana Kerja Tahun 2019, Kecamatan Wonoasih memiliki 2 sasaran, 63 indikator kinerja (kegiatan) dan 10 program yang harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan anggaran Belanja Langsung DPA-SKPD Tahun 2019 yang tersedia sebesar Rp. 17.007.040.241,00

Sementara capaian kinerja input atau penyerapan anggaran Kecamatan Wonoasih pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 4.795.868.107,00 atau 28,20% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 17.007.040.241,00.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wonoasih Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Wonoasih Tahun 2015-2019.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Wonoasih selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

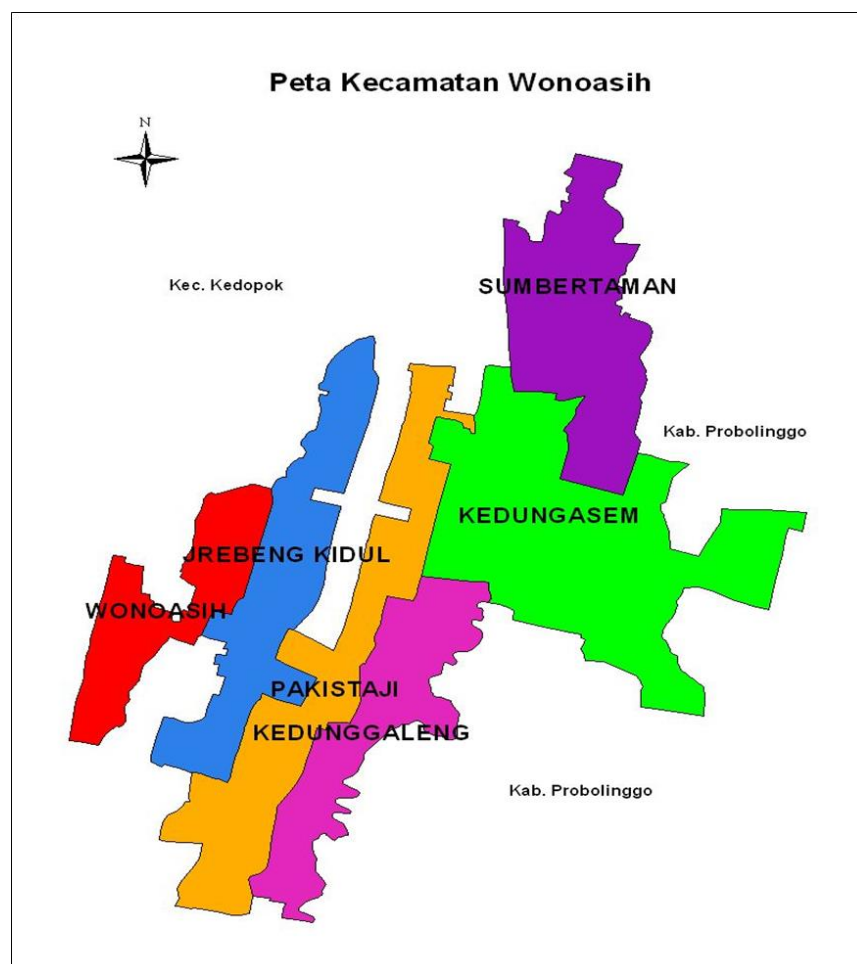
1.1 Gambaran Umum Organisasi

Kondisi dan Potensi Geografis

Kecamatan Wonoasih merupakan salah satu dari lima kecamatan yang ada di Kota Probolinggo. Kecamatan Wonoasih terletak pada 7° 48' Lintang Selatan dan 113° 12' Bujur Timur, dengan ketinggian daerah \pm 6 M s/d 12 M dari permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Wonoasih tercatat 10,981 Km² yang merupakan kecamatan terluas ketiga setelah Kecamatan Kedopok dan Kecamatan Kademangan (19,38 % dari luas Kota Probolinggo). Kecamatan Wonoasih batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedopok, sebelah

timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah Kabupaten Probolinggo. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wonomerto wilayah Kabupaten Probolinggo, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kedopok wilayah Kota Probolinggo. Kecamatan Wonoasih terbagi menjadi 6 kelurahan yaitu Kelurahan Wonoasih, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kelurahan Pakistaji, Kelurahan Kedunggaleng, Kelurahan Kedung Asem, dan Kelurahan Sumber Taman. Kelurahan Kedung Asem merupakan kelurahan terluas (3,145 Km²) dan Kelurahan Wonoasih merupakan kelurahan terkecil (0,843 Km²) Suhu udara maksimum tercatat 32° C sedang suhu udara minimum tercatat 26° C. Kecamatan Wonoasih mengalami perubahan iklim 2 jenis setiap tahun yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan hampir terjadi pada setiap bulan, kecuali bulan Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober yang tidak ada curah hujan atau tidak pernah turun hujan. Pada bulan Januari hingga bulan Desember jumlah hari hujan sebanyak 66 hari dengan jumlah curah hujan sebanyak 1.080 mm. Jumlah ini sudah kelihatan menurun bila dibandingkan dengan tahun lalu yang pada saat itu curah hujan sebanyak 1.414 mm dengan jumlah hari sebanyak 93 hari.

Gambar 1
Peta Kecamatan Wonoasih



Tabel 1.1

Luas Dan Jarak Kelurahan Ke Kecamatan Wonoasih

NO	KELURAHAN	LUAS PER KELURAHAN KM ²	JARAK KE KEC KM
1.	WONOASIH	0,843	0,7
2.	JREBENG KIDUL	1.970	0,2
3.	PAKISTAJI	1.855	1
4.	KEDUNG GALENG	1.298	1,5
5.	KEDUNG ASEM	3.145	5
6.	SUMBER TAMAN	1.870	6.5
JUMLAH		10.981	X

Sumber : Kecamatan Wonoasih Dalam Angka 2013

Kependudukan

Dari sisi demografi, Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo adalah sebanyak 33.182 jiwa yang terdiri dari 16.473 jiwa Laki-laki dan 16.709 jiwa perempuan. Secara lebih rinci jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan pada masing-masing kelurahan dapat dijelaskan dengan tabel jumlah penduduk berikut ini.

Tabel 1.2

JUMLAH PENDUDUK

Tahun 2019 (s/d Bulan Desember)

NO	KELURAHAN	PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
1	2	3	4	7
1.	Wonoasih	1.935	1.918	3.853
2.	Jrebeng Kidul	2.496	2.630	5.126
3.	Pakistaji	2.305	2.364	4.669
4.	Kedung Galeng	1.359	1.377	2.736
5.	Kedung Asem	3.607	3.612	7.219
6.	Sumber Taman	4.771	4.808	9.579
Jumlah : ...s/d Des 2019		16.473	16.709	33.182

Tabel 1.3
JUMLAH PENDUDUK
Menurut Kelompok Agama

NO	KELURAHAN	KELOMPOK AGAMA						
		ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCU	KEPERCAYAAN
1	WONOASIH	3.836	16	4	-	1	-	-
2	JREBENG KIDUL	5.112	14	-	-	-	-	-
3	PAKISTAJI	4.653	15	1	-	-	-	-
4	KEDUNG GALENG	2.736	-	-	-	-	-	-
5	KEDUNG ASEM	7.219	-	-	-	-	-	-
6	SUMBERTAMAN	9.317	135	120	4	3	-	-
JUMLAH		32.873	180	125	4	4	-	-

Tabel 1.4
Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	KELURAHAN						Jumlah
		WON	J.KIDUL	PAKISTAJI	K.GALENG	K.ASEM	S.TAMAN	
1	PNS/ABRI	96	249	21	13	57	1.189	1.625
2	Wiraswasta	394	260	1.100	215	498	455	2.922
3	Tani	115	225	300	206	1.223	785	2.854
4	Pertukangan	48	55	42	25	368	155	693
5	Buruh tani	112	228	747	186	2.644	1.225	5.142
6	Pensiunan	32	35	22	4	102	181	376
7	Nelayan	1	10	9	0	8	-	28
8	Buruh pabrik	371	167	87	25	300	1.435	2.385
9	Sopir	5	21	30	17	61	113	247
10	Muntir/bengkel	5	10	23	2	12	127	179
11	Tukang becak	60	160	100	12	130	192	654
12	Konfeksi	5	6	15	9	18	475	528
13	Jasa	60	40	59	125	485	293	1.062
14	Pengangguran	40	120	300	92	1.050	102	1.704
15	Lain-lain	132	86	250	325	-	-	793

Keadaan Sosial Budaya
Pendidikan

Tabel 1.5
Data Prasarana Pendidikan di Kecamatan Wonoasih

NO	KELURAHAN	PENDIDIDKAN UMUM						
		PAUD	TK/RA	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	PER.TINGGI	PONDOK
1	WONOASIH	3	7	4	1	1	-	-
2	JREBENG KIDUL	3	2	2	1	2	-	2
3	PAKISTAJI	2	3	3	-	-	-	-
4	KEDUNG GALENG	2	2	2	-	-	-	-
5	KEDUNG ASEM	2	2	5	-	-	-	-
6	SUMBERTAMAN	5	3	4	2	2	-	2
JUMLAH		17	19	20	4	5	0	4

Tabel 1.6
Penduduk menurut Jenis Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	KELURAHAN						Jumlah
		WON	J.KIDUL	PAKISTAJI	K.GALENG	K.ASEM	S.TAMAN	
1	SD / MI	1.388	667	431	1.227	2.619	786	7.118
2	SMP / Sederajat	1.827	442	97	366	1.726	629	5.087
3	SMA / Sederajat	590	388	80	233	2.356	1.812	5.459
4	Diploma	75	63	30	14	29	405	616
5	S.1	136	97	25	26	105	144	533
6	S.2	-	8	8	-	-	42	58
7	Putus Sekolah	226	-	611	16	119	17	989
8	Buta Huruf	118	-	515	238	10	5	886
9	Pendidikan Khusus	-	120	1	-	-	-	121
10	Pendidikan Umum	-	2214	-	-	-	-	2.214

Keagamaan

Tabel 1.7
Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Wonoasih

NO	KELURAHAN	TEMPAT PERIBADATAN		
		MASJID	MUSHOLLAH	GEREJA
1	WONOASIH	2	29	-
2	JREBENG KIDUL	3	15	-
3	PAKISTAJI	3	38	-
4	KEDUNGGALENG	2	23	-
5	KEDUNGASEM	4	36	-
6	SUMBERTAMAN	7	32	-
JUMLAH		21	173	-

Kesehatan

Tabel 1.8
Fasilitas Kesehatan

NO	FASILITAS KESEHATAN	KELURAHAN						Jumlah
		WON	J.KIDUL	PAKISTAJI	K.GALENG	K.ASEM	S.TAMAN	
1	Rumah sakit umum	-	-	-	-	-	-	0
2	Rumah sakit swasta	-	-	-	-	-	-	0
3	Puskesmas	1	-	-	-	-	-	1
4	Puskesmas Pembantu	-	-	1	-	1	-	2
5	Posyandu	4	5	6	4	11	8	38
6	Pos / Klinik KB	1	-	-	-	-	-	1
7	Dokter Praktek	-	2	-	-	-	4	6
8	Apotek	1	-	-	-	-	3	4

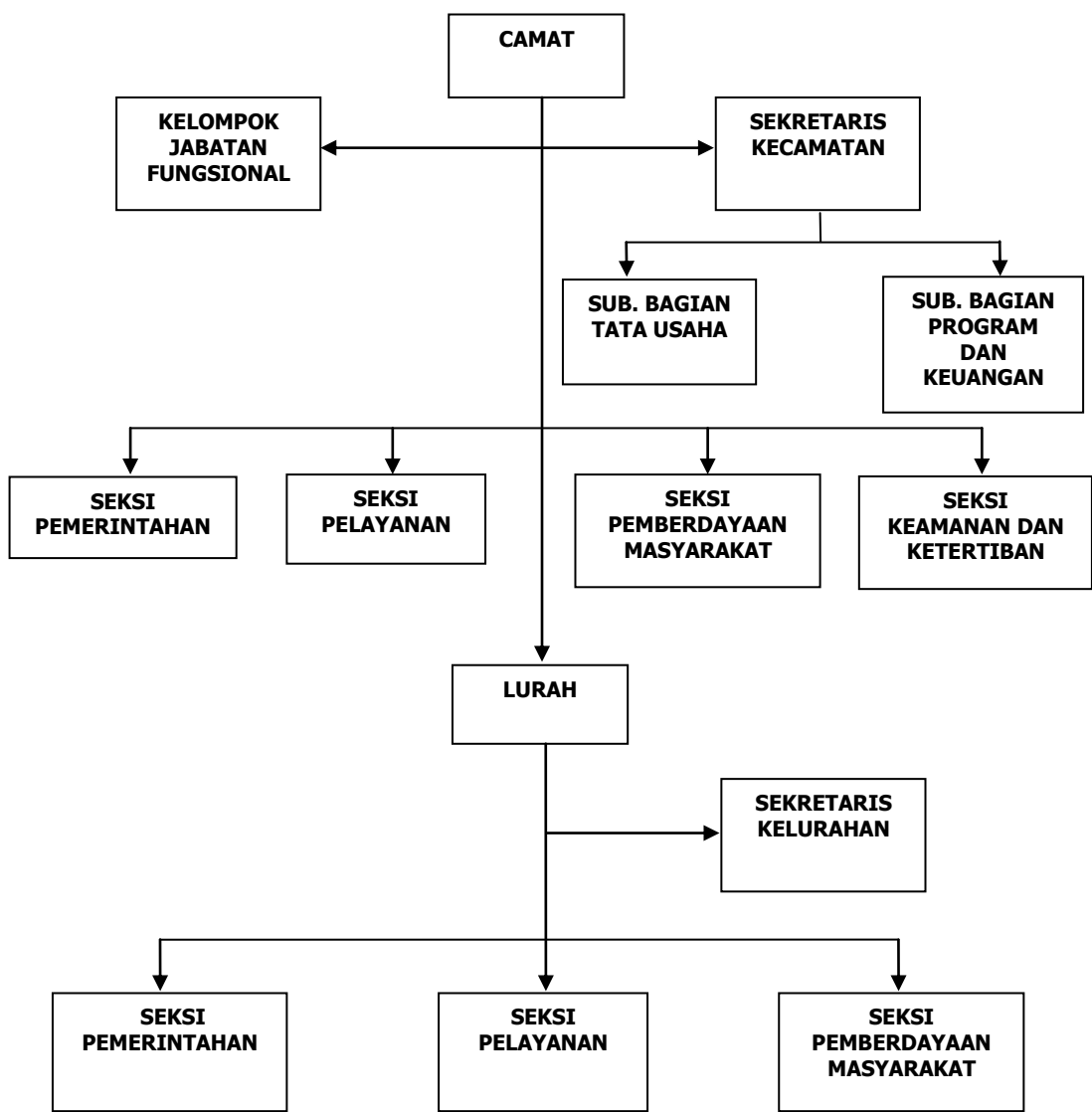
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Wonoasih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo, susunan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;

- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kelurahan;
- h. Sub bagian Program dan Keuangan;
- i. Sub bagian Umum;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Wonoasih



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo, kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Maka Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, Camat Wonoasih mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

a. Camat

Camat, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Camat** mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan;

- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unsur perangkat kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Sekretaris** mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- b. Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keputakaan dan kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Kecamatan;
- d. Pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Kecamatan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
- g. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris, membawahi :

➤ **Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian

Tata Usaha;

- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepastakaan dan tata kearsipan Kecamatan;
- e. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- g. Melaksanakan fasilitasi pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- h. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja Kecamatan;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Kecamatan;
- j. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- k. Penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- l. Melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan pembinaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Sub Bagian Program dan Keuangan**, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian

Program dan Keuangan;

- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. Pengadministrasian penerimaan dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
- f. Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- h. Melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
- j. Pelaksanaan penyelesaian terhadap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Kecamatan;
- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- m. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program dan Keuangan; dan
- o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemerintahan;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam

- pelaksanaan tugas;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
 - f. Menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada *website* serta penyiapan bahan rapat Kecamatan;
 - g. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi tertib administrasi pemerintahan kelurahan dan RT/RW;
 - h. Melaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemerintahan; dan
 - k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan kelurahan;

- i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan; dan
- k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat , mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian rakyat, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- g. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan (sesuai dengan pelimpahan kewenangan);
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan perlombaan kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan;
- g. melaksanakan dan koordinasi dalam penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan fasilitasi peningkatan dan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;
- i. melaksanakan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban, termasuk lingkungan kantor;
- j. Melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan/konflik di masyarakat/kelurahan;
- k. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang Dilimpahkan Walikota kepada Camat

Berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang 3 asas dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Ketiga asas tersebut merupakan landasan Pemerintah Kota Probolinggo untuk mengoptimalkan peran dan hakekat Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan mengacu pada 3 urusan, yakni menjalankan sebagian urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Sedangkan pembagian kewenangan Urusan Wajib sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah, maka agar Otonomi Daerah dapat berjalan sinergis dan efektif utamanya berorientasi pada aspek pelayanan publik maka telah ditempuh beberapa langkah penting antara lain:

- a. Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 melalui Pembentukan Kelembagaan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang regulasi perundangan yang terkait yang mendukung kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- b. Mengidentifikasi beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah melalui kajian yang bermuara pada aspek efektivitas dan efisiensi, sejauh mana ketepatan penanganannya, apakah tetap dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, dilimpahkan dari Pemerintah Daerah kepada Kecamatan atau bahkan kepada Kelurahan.

Salah satu hal positif dan konkrit dari pelimpahan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Camat adalah mendekatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat dengan sistem Satu Atap. Selanjutnya standar pelayanan minimal dilakukan berdasarkan Standart Operating Procedure (SOP) dengan mengedepankan asas kemudahan dan kecepatan sehingga masyarakat dapat memperoleh produk pelayanan dengan mudah dan cepat. Namun demikian persyaratan yang dipenuhi pemohon harus benar dan lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan.

Seiring dengan proses kajian yang dilakukan oleh pejabat dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka pada tahun 2007 telah diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat. Selanjutnya, dalam perkembangannya telah diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat yang merupakan penyempurnaan pelimpahan kewenangan demi peningkatan pelayanan sektor publik pada wilayah kecamatan.

Adapun bidang-bidang yang menjadi Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat berikut capaian pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Bidang Kewenangan	Subbidang Kewenangan		Rincian Kewenangan yang Dilimpahkan		Pelaksanaan Tahun 2018	Pelaksanaan Tahun 2019
1	2	3		4		5	6
1.	Bidang Pemerintahan	A.	Sub Bidang Hukum Perundang-undangan dan Politik Dalam Negeri	1.	Penerbitan Keputusan Camat di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.	22 SK	14 SK
				2.	Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayahnya.	Ikut pengawasan di Kecamatan	Ikut pengawasan di Kecamatan
				3.	Pemberian pertimbangan cerai bagi perangkat Kecamatan dan Kelurahan	-	1
				4.	Pembuatan Surat Keputusan Hukum Disiplin Ringan (Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan Pernyataan tidak Puas secara tertulis) terhadap perangkat Kecamatan dan Kelurahan.	-	-
				5.	Memfasilitasi penyelesaian antar kelompok	Tidak ada sengketa yang terjadi	Ada 2 sengketa (Kel. Kedung Asem dan Kel

No	Bidang Kewenangan	Subbidang Kewenangan	Rincian Kewenangan yang Dilimpahkan		Pelaksanaan Tahun 2018	Pelaksanaan Tahun 2019
1	2	3	4		5	6
				masyarakat dan sengketa yang terjadi di Kelurahan.	di Kelurahan	Kedung Galeng)
			6.	Memfasilitasi Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu diwilayahnya dan mengadakan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu di Tingkat Kecamatan.	Tidak ada kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pemilu	Koordinasi dengan 3 pilar dan PPK Kecamatan , Panwas Kecamatan untuk keamanan dan ketertiban demi lancarnya dan suksesnya pemilu
			7.	Penyelenggaraan Lomba / Penilaian Kelurahan Tingkat Kecamatan	Terdapat pelaksanaan lomba dalam peningkatan Kelurahan	Terdapat pelaksanaan lomba dalam peningkatan Kelurahan
			8.	Pemberian dan penetapan cuti bagi staf di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	1 Orang Cuti Melahirkan, 25 Orang Cuti Tahunan, 1 Orang Cuti Karena Alasan Penting, 2 Orang Cuti Sakit	2 Cuti Melahirkan, 3 Cuti Sakit, 165 Cuti Tahunan
			9.	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan dan Kelurahan : a. Pemungutan PBB dengan ketetapan di atas Rp. 2.000.000,- dilaksanakan oleh Kecamatan ; b. Pemungutan PBB dengan ketetapan di bawah Rp. 2.000.000.di	a. Baku Kecamatan : Rp.10.262.006 ,- Realisasi : Rp.10.262.006 ,- (100%) b.Baku Kelurahan Rp.445.863.154,- Realisasi : Rp.345.556.677,-	-

No	Bidang Kewenang an	Subbidang Kewenangan		Rincian Kewenangan yang Dilimpahkan		Pelaksanaan Tahun 2018	Pelaksanaan Tahun 2019
1	2	3		4		5	6
					laksanakan oleh Kelurahan ;	(77,50%)	
				10	Penyelenggaraan Koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Kewenangan yang dilimpahkan	3 kali pembinaan	3 Kali Pembinaan
		B .	Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Kemasyaraka tan	1	Memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi dan monitoring kegiatan lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat Kecamatan	Koordinasi terkait lembaga Kelurahan dilaksanakan di masing-masing Kelurahan dan tingkat Kecamatan	Koordinasi terkait lembaga Kelurahan dilaksanakan di masing-masing Kelurahan dan tingkat Kecamatan
				2.	Mendorong terciptanya pemberdayaan, pelestarian kesenian, pengembangan adat istiadat, organisasi profesi dan lembaga sosial kemasyarakatan.	Dalam mendorong kesenian / adat ditampilkan pada kegiatan SPKP dengan jadwal yang sudah ditetapkan	Dalam mendorong kesenian / adat ditampilkan pada kegiatan SPKP dengan jadwal yang sudah ditetapkan
		C .	Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban	1.	Berperan aktif membantu pembinaan, pengawasan dan penertiban keberadaan PKL, Anjal, Gepeng, PSK/ Waria.	Tidak ada penertiban yang dilakukan tahun 2018	Koordinasi/ Aksi Simpatik Penertipan PKL di depan pasar Wonoasih
				2.	Pelaksanaan	Tidak terjadi	Tidak terjadi

No	Bidang Kewenangan	Subbidang Kewenangan		Rincian Kewenangan yang Dilimpahkan		Pelaksanaan Tahun 2018	Pelaksanaan Tahun 2019
1	2	3		4		5	6
					penanganan bencana dan rehabilitasi di Wilayah Kecamatan	bencana pada tahun 2018	bencana pada tahun 2018
				3.	Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap gerakan ekstrim.	Tidak ada kegiatan di tahun 2018	Rapat koordinasi terkait penolakan ajaran yang di anggap mengganggu kamtibmas di Kelurahan Sumber Taman
				4.	Penyelenggaraan Ijin Rumah Pemdokan di Wilayah Kecamatan Wonoasih	Ijin ini berlaku 5 Tahun sekali (kalau masih berjalan didaftar ulang) dan dilaksanakan 5 tahun sekali	-
2.	Bidang Pembangu-nan	A .	Sub Bidang Non Fisik	1.	Penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kelurahan yang berbasis peran serta masyarakat (Musrenbangcam dan Musrenbangkel).	Dilaksanakan Bulan Januari s/d Maret	Dilaksanakan Bulan Januari s/d Maret
				2.	Pengendalian, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan pembangunan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.	Dilakukan pengawasan bangunan setiap bulan.	Dilakukan pengawasan bangunan
				3.	Merekomendasikan usulan permintaan bantuan pembangunan dari masyarakat / LSM.	Permintaan bantuan dan usulan sudah tercover di dalam	Permintaan bantuan dan usulan sudah tercover di dalam kegiatan

No	Bidang Kewenangan	Subbidang Kewenangan		Rincian Kewenangan yang Dilimpahkan		Pelaksanaan Tahun 2018	Pelaksanaan Tahun 2019
1	2	3		4		5	6
						kegiatan Musrenbang	Musrenbang
		B .	Sub Bidang Fisik	1.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan partisipasi di Kelurahan dan antar Kelurahan di Wilayah Kecamatan.	Tidak ada Pembinaan terhadap pelaksanaan pembanguna n partisipasi di Kelurahan dan antar Kelurahan di Wilayah Kecamatan.	Tidak ada Pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan partisipasi di Kelurahan dan antar Kelurahan di Wilayah Kecamatan.
				2.	Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman kecil (<20 m²) yang berada di Wilayah Kecamatan	Tidak ada pembanguna n taman di 2018	Ada Pemeliharaan Taman
				3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana kebersihan pada Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.	-	-
				4.	Mengkoordinasikan pengambilan langkah-langkah penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.	Telah dilaksanakan koordinasi terkait pencemaran lingkungan di wilayah kecamatan	Telah dilaksanakan koordinasi terkait pencemaran lingkungan di wilayah kecamatan
				5.	Melakukan pengendalian pengkoordinasian kegiatan pengambilan dan pengumpulan sampah dari sumber	Sebagian Kelurahan melakukan pengendalian sampah dengan membuat	Sebagian Kelurahan melakukan pengendalian sampah dengan membuat suatu

No	Bidang Kewenangan	Subbidang Kewenangan	Rincian Kewenangan yang Dilimpahkan		Pelaksanaan Tahun 2018	Pelaksanaan Tahun 2019
1	2	3	4		5	6
				sampai ke TPS pada lingkungan Kec. dan Kel.	suatu Bank Sampah	Bank Sampah
			6.	Pengadaan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di jalan-jalan lingkungan Kel. selain jalan protokol.	Telah dilakukan Pengadaan dan Pemeliharaan LPJU dikelurahan berdasarkan surat / permintaan warga sebanyak 6 titik	Telah dilakukan Pengadaan dan Pemeliharaan LPJU dikelurahan berdasarkan surat / permintaan warga sebanyak 6 titik
			7.	Berperan aktif dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup terutama yang ditimbulkan oleh industri kecil, rumah tangga dan limbah domestik lainnya.	Melakukan koordinasi dalam pencemaran lingkungan di wilayah Kecamatan Wonoasih	Melakukan koordinasi dalam pencemaran lingkungan di wilayah Kecamatan Wonoasih
			8.	Membantu pengawasan dan pengendalian hutan bakau dan kawasan lindung.	Tidak ada Hutan Bakau di Wilayah Kecamatan Wonoasih	Tidak ada Hutan Bakau di Wilayah Kecamatan Wonoasih
			9.	Pengawasan, pelarangan dan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar di tanah pengairan dan tanah negara.	<ul style="list-style-type: none"> •Melakukan koordinasi terkait pembangun an jembatan di kelurahan wonoasih •Pengecekan lokasi bangunan liar di kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> •Melakukan koordinasi terkait pembanguna n jembatan di kelurahan Pakistaji

No	Bidang Kewenangan	Subbidang Kewenangan		Rincian Kewenangan yang Dilimpahkan		Pelaksanaan Tahun 2018	Pelaksanaan Tahun 2019
1	2	3		4		5	6
						pakistaji, khususnya bangunan pabrik tahu	
				10.	Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan HIPPA serta pelayanan pembagian air irigasi disetiap kelurahan.	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan
				11.	Pemberian rekomendasi Surat Keterangan rencana Kota.	Tidak ada rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kota (telah ditangani langsung oleh DPU)	Tidak ada rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kota (telah ditangani langsung oleh DPU)
				12.	Pemberian fasilitas dan melakukan penyaluran Bantuan Langsung (Block Grand) dalam pelaksanaan dana swakelola kepada Kelurahan berbasis partisipasi masyarakat yang berskala kecil.	Tidak ada Pemberian Fasilitas yang dilakukan	Tidak ada Pemberian Fasilitas yang dilakukan
				13.	Membina dan memberdayakan kelompok informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	Tidak ada Pembinaan	Tidak ada Pembinaan
3.	Bidang Pemberdayaan-an Masyarakat dan Kesejahter	A .	Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	1.	Pemberian Rekomendasi permintaan sumbangan kepada masyarakat diwilayah	Tidak pernah ada permintaan rekomendasi sumbangan	Tidak pernah ada permintaan rekomendasi sumbangan

No	Bidang Kewenangan	Subbidang Kewenangan		Rincian Kewenangan yang Dilimpahkan		Pelaksanaan Tahun 2018	Pelaksanaan Tahun 2019
1	2	3		4		5	6
	a-an Sosial				Kecamatan dan Kelurahan.		
		B .	Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	2.	Rekomendasi terhadap kegiatan pembangunan tempat ibadah dari tingkat RT/RW dan Kelurahan.	Tidak pernah ada permintaan rekomendasi	Tidak pernah ada permintaan rekomendasi
				3.	Koordinasi dalam memelihara dan meningkatkan kerukunan umat beragama.	Peringatan hari-hari besar keagamaan	Peringatan hari-hari besar keagamaan
				4.	Pembinaan bagi masyarakat yang sudah lanjut usia yang ada diwilayahnya.	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan
				5.	Koordinasi kegiatan dan evaluasi pelaksanaan UKS yang ada diwilayahnya.	Telah dilaksanakan di tanggal 12 -20 Nopember Tahun 2018	Dilaksanakan dalam lomba Tingkat Nasional
4.	Bidang pelayanan Administrasi Publik			1.	Pemberian ijin penutupan jalan untuk keramaian, kegiatan komersial dan kegiatan sosial yang bukan jalan protokol.	Sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 dilimpahkan kepada Kepolisian RI	Sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 dilimpahkan kepada Kepolisian RI
				2.	Berperan aktif dalam penertiban dan pengawasan Uji Timbangan (kemetrologian).	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan
				3.	Pemberian surat keterangan pindah baik antar Kelurahan, Antar Kecamatan maupun antar Daerah.	Pindah antar kelurahan : 4 orang Pindah antar kecamatan : 128 orang Pindah antar Daerah : 217	Pindah antar kelurahan : 14 orang Pindah antar kecamatan : 171 orang Pindah antar Daerah : 179

No	Bidang Kewenang an	Subbidang Kewenangan	Rincian Kewenangan yang Dilimpahkan		Pelaksanaan Tahun 2018	Pelaksanaan Tahun 2019
1	2	3	4		5	6
					orang	orang
			4.	Pelaporan mutasi penduduk.	376 orang	1175 orang
			5.	Merekomendasikan dan melegalisasi Surat / dokumen untuk kepentingan Warga/Masyarakat.	25 Rekomendasi	46 Rekomendasi
			6.	Pemberian Ijin Mendirikan Banguan (IMB) dibawah Tipe 70	13 IMB	Dilimpahkan Ke DPMPTSP
			7.	Rekomendasi Ijin Mendirikan Banguan (IMB) diatas Tipe 70.	2 Rekomendasi IMB	13 Rekomendasi IMB

(Sumber : Data Realisasi Kegiatan Kecamatan Wonoasih 2019)

1.2 Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Instansi

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Wonoasih sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016, maka Kecamatan Wonoasih mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Wonoasih masih kurang bagus secara optimal. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pelaku usaha yang tergolong keterbatasan modal sehingga belum bisa mandiri secara finansial dan kreatifitas, jadi masih sangat perlu dorongan dorongan dari pemerintah khususnya terkait permodalan dan pelatihan.
2. Jumlah Warga miskin di Kecamatan Wonoasih belum memperlihatkan pengurangan yang berarti. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya belum adanya kemandirian dan jiwa kewirausahaan dari warga penerima bantuan sehingga barang-barang bantuan yang diterima kurang optimal dimanfaatkan dengan baik atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja.
3. Sebagaimana permasalahan lingkungan pada umumnya, sampah merupakan permasalahan lingkungan yang sangat penting. Sampah yang bila tidak tertangani dengan baik akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap bahkan menjadi sumber penyakit. Meskipun hingga saat ini jumlah sampah yang ada di Kota Probolinggo masih dapat tertangani dengan baik, namun untuk

masa mendatang jumlah sampah yang dibuang ke TPA tidak dapat diatasi dikarenakan keterbatasan lahan, maka dari itu diperlukan upaya antisipasi dan mengedepankan upaya pengelolaan sampah mandiri dengan 4R (*Replace, Reuse, Reduce dan Recycle*) di masing-masing wilayah kecamatan dan kami sangat berharap pelayanan persampahan belum seluruhnya menjangkau wilayah Kecamatan Wonoasih,

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 yang menjadi acuan bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo 2015-2019 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan Dinas selama periode 5 tahun kedepan (2015-2019) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi serta agenda pembangunan Walikota dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Probolinggo.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Probolinggo khususnya pada Misi 3 dengan sasaran “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akutabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Partisipasi Publik” dan Misi 5 dengan sasaran “Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal”.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Probolinggo khususnya pada Misi Ketiga dengan sasaran : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Perluasan Partisipasi Publik;

Visi Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 adalah :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA MENUJU KECAMATAN WONOASIH
YANG PARTISIPATIF, AMAN DAN SEJAHTERA BERKELANJUTAN.”**

Dengan kata lain Kecamatan Wonoasih bertekad untuk mewujudkan **“Good governance”** melalui peningkatan kinerja dalam bidang pemerintahan dan pembangunan yang berorientasikan

kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik. Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut :

1. **PELAYANAN PRIMA** : adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Kecamatan Wonoasih melebihi standar pelayanan yang ada sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan
2. **PARTISIPATIF** : adalah suatu kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang melalui saran dan keterlibatan langsung tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.
3. **AMAN** : adalah suatu kondisi atau keadaan yang menggambarkan suatu wilayah mampu meminimalisir ataupun terhindar dari segala macam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. **SEJAHTERA BERKELANJUTAN** : adalah menggambarkan derajat kehidupan masyarakat yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan visi diatas maka ditetapkan misi yang diemban Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KINERJA PELAYANAN

Misi ini adalah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dengan ditopang oleh sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

2. MENINGKATKAN KINERJA PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PADA MASYARAKAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Misi ini adalah untuk menciptakan suatu system pembangunan yang bersumber pada inisiatif, prakarsa antara pemerintah dan masyarakat serta berorientasi pada kelestarian lingkungan.

3. MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG BERKUALITAS

Misi ini adalah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang mampu memberikan jaminan rasa aman bagi warga masyarakat dengan menggerakkan sistem keamanan swakarsa di lingkungan masyarakat.

4. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAD

Misi ini adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi kreatif bagi pelaku UKM di wilayah Kecamatan Wonoasih sehingga nantinya UKM tersebut bisa mandiri dan mampu berkembang sebagai kekuatan ekonomi di wilayah Kecamatan Wonoasih dan memiliki daya saing,selain itu juga bisa mengoptimalkan potensi penerimaan PAD baik dari sector retribusi maupun dari sektor pajak.

5. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT DAN SEJAHTERA

Misi ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia di Kecamatan Wonoasih yang sehat dan sejahtera melalui peningkatan kualitas taraf hidup keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas keluarga miskin. Agar mereka bisa mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya.

2.2 Program dan Kegiatan

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dalam periode 2015-2019, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Program dan Kegiatan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
		- Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat komunikasi
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga ,Alat Studio dan Alat Komunikasi
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
		Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan , Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)
		- Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
		- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD
		- Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)
		- Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya
		- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
4.	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	- Pembinaan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
		- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6.	Program Peningkatan Pelayanan di Kecamatan	- Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan di Kecamatan
		- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
		- Sosialisasi Jenis-jenis Pelayanan
7.	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	- Penyusunan Profil SKPD
		- Pengelolaan Website Kecamatan
		- Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sumber Taman
		- Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Asem
		- Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedunggaleng
		- Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pakistaji
		- Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jebeng Kidul
		- Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wonoasih
		- Peningkatan Kinerja RT dan RW
		- Pembinaan RT dan RW
		- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemerintahan
8.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	- Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu Tingkat Kecamatan
		- Fasilitasi Operasional Pengendalian Keamanan Tingkat Kecamatan
		- Fasilitasi Peningkatan Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan
9.	Program Peningkatan Disiplin	- Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari- hari

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
10.	Aparatur Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	besar Nasional
		- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
		- Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
		- Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK
		- Fasilitasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak Tingkat Kecamatan
		- Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
		- Fasilitasi Peningkatan Kebersihan Lingkungan
		- Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat Aktif Tingkat Kecamatan
		- Fasilitasi Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
		- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
		- Pengadaan dan Pemeliharaan PJU di Jalan Lingkungan Kelurahan
		- Fasilitasi Promosi Pengembangan Potensi Kecamatan
		- Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan
		- Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Pakistaji
		- Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kedunggaleng
		- Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Sumber Taman
		- Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kedung Asem
		- Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Irebeng Kidul
		- Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Wonoasih
		- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakistaji
		- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedunggaleng
		- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Taman
		- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedung Asem
		- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Irebeng Kidul
		- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonoasih
		- Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2015-2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,50
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan Wonoasih	Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	290

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	Rp. 990.507.366,60,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 629.986.300,00
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 36.615.000,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Rp. 164.798.400,00
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 0,00
6.	Program Peningkatan Pelayanan di Kecamatan	Rp. 135.424.000,00
7.	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 1.680.140.160,00
8.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Rp. 345.091.500,00

No.	Program	Anggaran
9.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 42.765.000,00
10.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 12.981.712.514,40
	JUMLAH	Rp. 17.007.040.241,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja yang terdiri dari penetapan Indikator dan Capaian Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan suatu kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pengukuran kinerja ini mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintahan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Berdasarkan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2015-2019, Visi, Misi dan Tujuan, serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019. Berikut predikat pengelompokan nilai capaian kinerja Kecamatan Wonoasih:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kategori

No	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini Pengukuran Kinerja Kecamatan Wonoasih didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Ditinjau dari Capaian Kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2019, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo telah dapat melaksanakan tugas utama yang

menjadi tanggung jawab Kecamatan. Berikut ini akan diuraikan kinerja dari Kecamatan Wonoasih, dilihat dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja (performance results) untuk masing- masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Capaian Kinerja Sasaran Strategis I (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih).
 - a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,50	93,97	111,21%

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
		2018	2019
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,50	94,12	93,97

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 sampai dengan akhir periode Renstra

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Periode Renstra

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA (2019)	REALISASI (2019)	TINGKAT KEMAJUAN
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,50	93,97	111,21%

d. Alokasi per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.5
Alokasi per-Sasaran Pembangunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	Prosentase Anggaran terhadap anggaran Perangkat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp. 15.326.900.081,-	90,12%

e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.6
Kinerja dan Anggaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,50	93,97	111,21%	Rp. 15.326.900.081	Rp. 3.191.374.561	20,82%

f. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.7
Tingkat Efisiensi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROSENTASE CAPAIAN KINERJA	PROSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Kepuasan Masyarakat	111,21%	20,82%	18,72%

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan dan Kegagalan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.8
Analisis

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	ANALISA PENYEBAB
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,50	93,97	Peningkatan kinerja dapat tercapai karena meningkatnya kualitas SDM dan terpenuhinya sarana prasarana serta adanya inovasi-inovasi pelayanan

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.9
Analisis Program/Kegiatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program/Kegiatan
1	2	3	4
Indeks Kepuasan Masyarakat	84.50	93.97	Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah
			Pembinaan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
			Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
			Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program/Kegiatan
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga ,Alat Studio dan Alat Komunikasi
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan , Gerbang dan Pagar Pavingisasi dll)
			Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
			Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD
			Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)
			Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Program Peningkatan Pelayanan di Kecamatan
			Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan di Kecamatan
			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
			Sosialisasi Jenis-Jenis Pelayanan
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
			Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu Tingkat Kecamatan
			Fasilitasi Operasional Pengendalian Keamanan Tingkat Kecamatan
			Fasilitasi Peningkatan Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur
			Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari - Hari Besar Nasional
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
			Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
			Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK
			Fasilitasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak Tingkat Kecamatan
			Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
			Fasilitasi Peningkatan Kebersihan Lingkungan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program/Kegiatan
			Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat Aktif Tingkat Kecamatan
			Fasilitasi Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
			Pengadaan dan Pemeliharaan PJU di Jalan Lingkungan Kelurahan
			Fasilitasi Promosi Pengembangan Potensi Kecamatan
			Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan
			Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Pakistaji
			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kedunggaleng
			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Sumber Taman
			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kedung Asem
			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Jrebeng Kidul
			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Wonoasih
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakistaji
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedunggaleng
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Taman
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedung Asem
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jrebeng Kidul
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonoasih

- 2) Capaian Kinerja Sasaran Strategis II (Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan).
- a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	290	265	91,38%

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Tabel 3.11
Realisasi Kinerja 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
		2018	2019
Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	290	0	265

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 sampai dengan akhir periode Renstra

Tabel 3.12
Realisasi Kinerja Periode Renstra

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Akhir Renstra (Tahun 2019)	REALISASI (2019)	Tingkat Kemajuan
Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	290	265	91,38%

d. Alokasi per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.13
Alokasi per-Sasaran Pembangunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	Prosentase Anggaran terhadap Anggaran Perangkat Daerah
Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 1.680.140.160,-	9,88%

e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.14
Kinerja dan Anggaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kinerja			Anggaran (Rp)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	290	265	91,38%	Rp. 1.680.140.160,-	Rp. 1.604.493.546,-	95,50%

f. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.15
Tingkat Efisiensi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROSENTASE CAPAIAN KINERJA	PROSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	92,38%	95,50%	103,38%

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan dan Kegagalan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.16
Analisis

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	ANALISA PENYEBAB
Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	290	265	Kesulitan sinkronisasi saat entry tahun berjalan dengan database isian tahun sebelumnya

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.17
Analisis Program/Kegiatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program/Kegiatan
1	2	3	4
Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	290	265	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
			Penyusunan Profil SKPD
			Pengelolaan Website Kecamatan
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sumber Taman
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Asem
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedunggaleng
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pakistaji
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jrebeng Kidul
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wonoasih
			Peningkatan Kinerja RT dan RW
			Pembinaan RT dan RW
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemerintahan

3.2. Realisasi Anggaran

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66,805,921.00	41,100,147.00	61.52%
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	287,407,445.60	172,951,700.00	60.18%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	310,628,100.00	300,393,633.00	96.71%
		Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	325,665,900.00	289,322,221.00	88.84%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi	166,900,000.00	162,950,500.00	97.63%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	105,000,000.00	104,849,250.00	99.86%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	40,900,000.00	40,303,500.00	98.54%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	44,100,000.00	38,611,500.00	87.55%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga ,Alat Studio dan Alat Komunikasi	66,001,800.00	65,851,000.00	99.77%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan , Gerbang dan Pagar Pavingisasi dll)	175,584,500.00	171,853,500.00	97.88%
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	11,500,000.00	11,393,100.00	99.07%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00%
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD	12,910,000.00	12,785,000.00	99.03%
		Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)	5,400,000.00	5,250,000.00	97.22%
		Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya	6,889,000.00	6,859,000.00	99.56%
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	5,816,000.00	5,816,000.00	100.00%
4	Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Pembinaan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	159,390,400.00	151,089,250.00	94.79%
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	5,408,000.00	5,356,000.00	99.04%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0.00%
6	Program Peningkatan Pelayanan di Kecamatan	Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan di Kecamatan	25,990,000.00	25,990,000.00	100.00%
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	69,991,000.00	69,979,000.00	99.98%
		Sosialisasi Jenis-Jenis Pelayanan	39,443,000.00	39,443,000.00	100.00%
7	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Penyusunan Profil SKPD	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00%
		Pengelolaan Website Kecamatan	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sumber Taman	167,617,000.00	155,974,562.00	93.05%
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Asem	183,206,800.00	177,471,060.00	96.87%
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedunggaleng	174,363,760.00	154,622,347.00	88.68%
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pakistaji	178,676,000.00	154,562,994.00	86.50%
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Irebeng Kidul	161,746,000.00	157,811,286.00	97.57%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wonoasih	168,489,600.00	158,880,797.00	94.30%
		Peningkatan Kinerja RT dan RW	526,520,000.00	526,520,000.00	100.00%
		Pembinaan RT dan RW	56,600,000.00	56,050,000.00	99.03%
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemerintahan	51,721,000.00	51,400,500.00	99.38%
8	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu Tingkat Kecamatan	223,573,000.00	223,571,000.00	100.00%
		Fasilitasi Operasional Pengendalian Keamanan Tingkat Kecamatan	47,899,500.00	47,896,500.00	99.99%
		Fasilitasi Peningkatan Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	73,619,000.00	73,619,000.00	100.00%
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari - Hari Besar Nasional	3,665,000.00	3,425,000.00	93.45%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	39,100,000.00	39,100,000.00	100.00%
10	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	157,810,000.00	156,786,800.00	99.35%
		Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	77,412,000.00	72,948,500.00	94.23%
		Fasilitasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak Tingkat Kecamatan	10,171,560.00	10,146,560.00	99.75%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
		Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	13,906,000.00	13,906,000.00	100.00%
		Fasilitasi Peningkatan Kebersihan Lingkungan	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00%
		Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat Aktif Tingkat Kecamatan	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%
		Fasilitasi Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	44,950,200.00	44,950,000.00	100.00%
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	110,548,000.00	110,250,000.00	99.73%
		Pengadaan dan Pemeliharaan PJU di Jalan Lingkungan Kelurahan	120,000,000.00	119,500,000.00	99.58%
		Fasilitasi Promosi Pengembangan Potensi Kecamatan	112,700,000.00	109,979,000.00	97.59%
		Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan	232,096,500.00	231,666,900.00	99.81%
		Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	-	-	0.00%
		Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Pakistaji	645,647,000.00	29,790,000.00	4.61%
		Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kedunggaleng	214,193,760.00	-	0.00%
		Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Sumber Taman	262,540,000.00	34,348,000.00	13.08%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
		Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kedung Asem	576,637,000.00	33,156,000.00	5.75%
		Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Jrebeng Kidul	664,641,000.00	31,161,000.00	4.69%
		Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Wonoasih	369,953,500.00	11,427,000.00	3.09%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakistaji	1,359,294,000.00	-	0.00%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedunggaleng	1,797,962,434.40	-	0.00%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Taman	1,750,198,060.00	-	0.00%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedung Asem	1,433,104,000.00	-	0.00%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jrebeng Kidul	1,343,660,000.00	-	0.00%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonoasih	1,638,287,500.00	-	0.00%
JUMLAH			17,007,040,241.00	4,795,868,107.00	28.20%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019. Pembuatan LKj-IP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj-IP Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 111,21% atau interpretasi sangat baik

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 91,38% atau interpretasi baik

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 17.007.040.241,00,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.795.868.107,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 28,20%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo kondisi anggaran adalah SILPA Rp. 12.211.172.134,-.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut Kecamatan Wonoasih telah menggunakan anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 4.795.868.107,- dari total anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 17.007.040.241,-. Kecamatan Wonoasih telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo adalah 28,20% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Probolinggo, maka perlu lebih ditingkatkan kembali Kinerja dari Kecamatan Wonoasih.

4.2 Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja

Melihat dari hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan misi-misi dan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja kedepan, maka diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja guna mencapai target yang lebih. Secara garis besar upaya atau langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelayanan publik.